



**RENSTRA  
TAHUN 2024 - 2026**

**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan Rahmat-Nya sehingga kami dapat menyusun dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2024-2026.

Dokumen Rencana Strategis ini merupakan pedoman dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah sampai 3 (tiga) tahun ke depan.

Dengan berpedoman pada Rencana Strategis ini, seluruh karyawan di lingkungan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang diharapkan untuk meningkatkan tanggung jawab, disiplin kerja sesuai dengan tujuan dan sasaran sehingga kegiatan dapat dilaksanakan secara terarah, tepat waktu dan mencapai hasil sesuai dengan target yang ditetapkan.

Rencana strategis ini disusun dengan segala keterbatasan dan tentu masih terdapat kekurangan. Masukan yang positif dari seluruh pihak diharapkan sebagai upaya perbaikan lebih lanjut. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita dalam pelaksanaan tugas dalam bidang pengelolaan keuangan daerah.

Lumajang, 02 Mei 2023  
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH



**SUNYOTO, SE, MM, MSA. Ak. CA**  
NIP. 19660709 199703 1001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 LATAR BELAKANG .....	1
1.2 LANDASAN HUKUM .....	3
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN .....	5
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN .....	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH .....	8
2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR PERANGKAT DAERAH .....	8
2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH .....	19
2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH .....	22
2.4 KELOMPOK SASARAN LAYANAN .....	28
2.5 MITRA PERANGKAT DAERAH DALAM PEMBERIAN PELAYANAN .....	29
2.6 DUKUNGAN BUMD DALAM PENCAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH .....	29
2.7 KERJASAMA PERANGKAT DAERAH .....	29
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH ..	31
3.1 PERMASALAHAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH .....	31
3.4 ISU STRATEGIS .....	34
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....	36
4.1 TUJUAN DAN SASARAN .....	36
4.2 CASCADING KINERJA PERANGKAT DAERAH .....	38
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....	61
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....	64
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....	93
7.1 PENENTUAN TARGET TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PD TAHUN 2024-2026 .....	93
7.2 PENENTUAN TARGET KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH .....	93
BAB VIII PENUTUP .....	96

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Masa jabatan Kepala Daerah Kabupaten Lumajang pada tahun 2023 akan berakhir. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023, diamanatkan bahwa Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir tahun 2023 untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026 dan ditetapkan paling lambat akhir Maret 2023. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lumajang Tahun 2024-2026 mengakomodir kebijakan, prioritas dan program strategi bupati yang masih menjabat dan menjadi acuan penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Lumajang tahun 2024,2025 dan 2026.

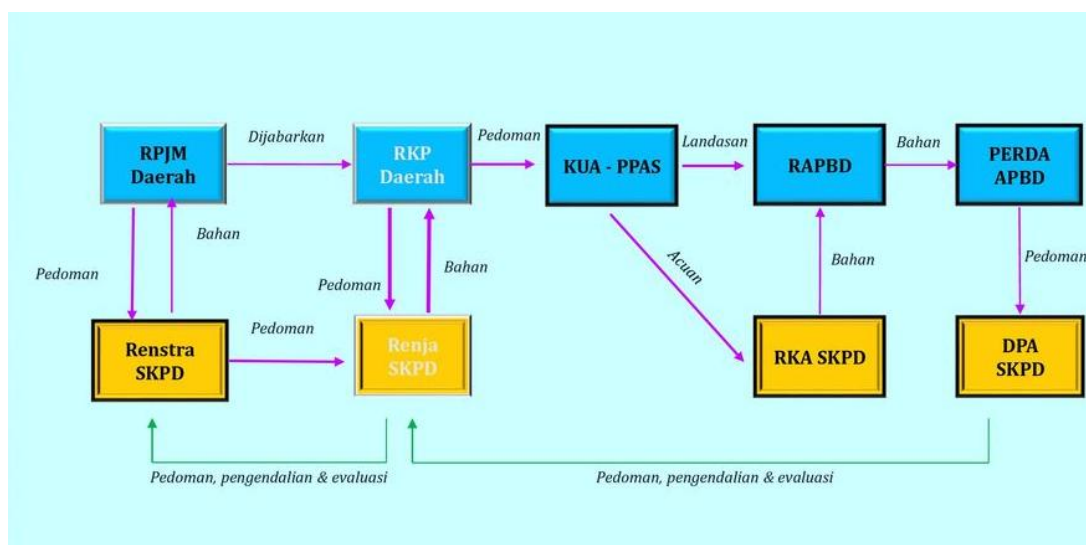
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Mengatur juga bahwa Pemerintah Daerah diharuskan menyusun perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah meliputi rencana pembangunan daerah yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Perangkat Daerah yang terdiri dari Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 2024, 2025 dan 2026. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024-2026 adalah dokumen kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah untuk masa kerja tiga tahun mendatang. Dokumen ini menjadi penting karena dalam

masa tiga tahun tersebut, Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang selaku Perangkat Daerah berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan ini.

Penyusunan Renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2024-2026 diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman serta arah kebijakan dalam mewujudkan Tujuan Pemerintah Kabupaten Lumajang yaitu “Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan inovatif”, dengan sasaran “Optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi”, yang dijabarkan ke dalam 3 (tiga) program dengan 14 (empat belas) Kegiatan, dan 93 (sembilan puluh tiga) sub kegiatan.

Renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang mempunyai hubungan dengan beberapa dokumen perencanaan lainnya. Hubungan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar I.1 Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Daerah (Renstra). Rencana Kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah sebagai pedoman perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari Renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dokumen Rencana Kerja inilah yang kemudian menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah

## **1.2 Landasan Hukum**

Renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang tahun 2024-2026 disusun berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar Tahun 1945 dengan landasan operasional peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara ;
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Keuangan Negara ;
3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
4. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
5. Undang - Undang No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ;
6. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 86 Tahun 2017, Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal.

13. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
14. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 100 Tahun 2018 tentang Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
15. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD),
16. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
17. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2005-2025
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 04 Tahun 2021 Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.
22. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengarusutamaan Gender.
23. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 55 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2020-2024 ;
24. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang.
25. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2024-2026.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang sebagai berikut :

- a. Sebagai dokumen perencanaan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang dalam rangka mewujudkan Tujuan serta sasaran Pemerintah Kabupaten Lumajang yang sebagaimana tertuang pada RPD Kabupaten Lumajang Tahun 2024-2026
- b. Sebagai dokumen perencanaan untuk dijadikan pedoman dan landasan bagi *stakeholder* di lingkungan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan program dan kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang pengelolaan keuangan daerah selama 3 (tiga) tahun ke depan.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang adalah :

- a. Menerjemahkan Tujuan dan Sasaran program pembangunan dalam RPD Kabupaten Lumajang secara nyata ke dalam program dan kegiatan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
- b. Mewujudkan perencanaan dan penganggaran terpadu yang berbasis kinerja dengan *output* yang terukur;
- c. Menciptakan mekanisme pelaksanaan program dan kegiatan SKPD yang fokus, tidak tumpang tindih, dan terintegrasi;
- d. Landasan evaluasi dan penilaian atas capaian kinerja pengelolaan keuangan daerah yang terukur, transparan, dan akuntabel.



## **1.4 Sistematika Penulisan**

Perubahan Renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar belakang.
- 1.2 Landasan hukum.
- 1.3 Maksud dan tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

### **BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Kelompok Sasaran Layanan
- 2.5 Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan
- 2.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah
- 2.7 Kerjasama Perangkat Daerah

### **BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Isu Strategis

### **BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN**

- 4.1 Tujuan dan Sasaran.
- 4.2 Cascading Kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah

### **BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

- BAB VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN  
SERTA PENDANAAN
- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- 7.1 Penentuan target Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun  
2024-2026
- 7.2 Penentuan Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan  
Pemerintah Daerah
- BAB VIII : PENUTUP

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD**

Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 13 tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah dan Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 110 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah. Dengan tugas pokok, fungsi, struktur organisasi sebagai berikut:

##### **2.1.1 Tugas Pokok**

Sebagai unsur penunjang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang mempunyai tugas pokok “Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan daerah”.

##### **2.1.2 Fungsi**

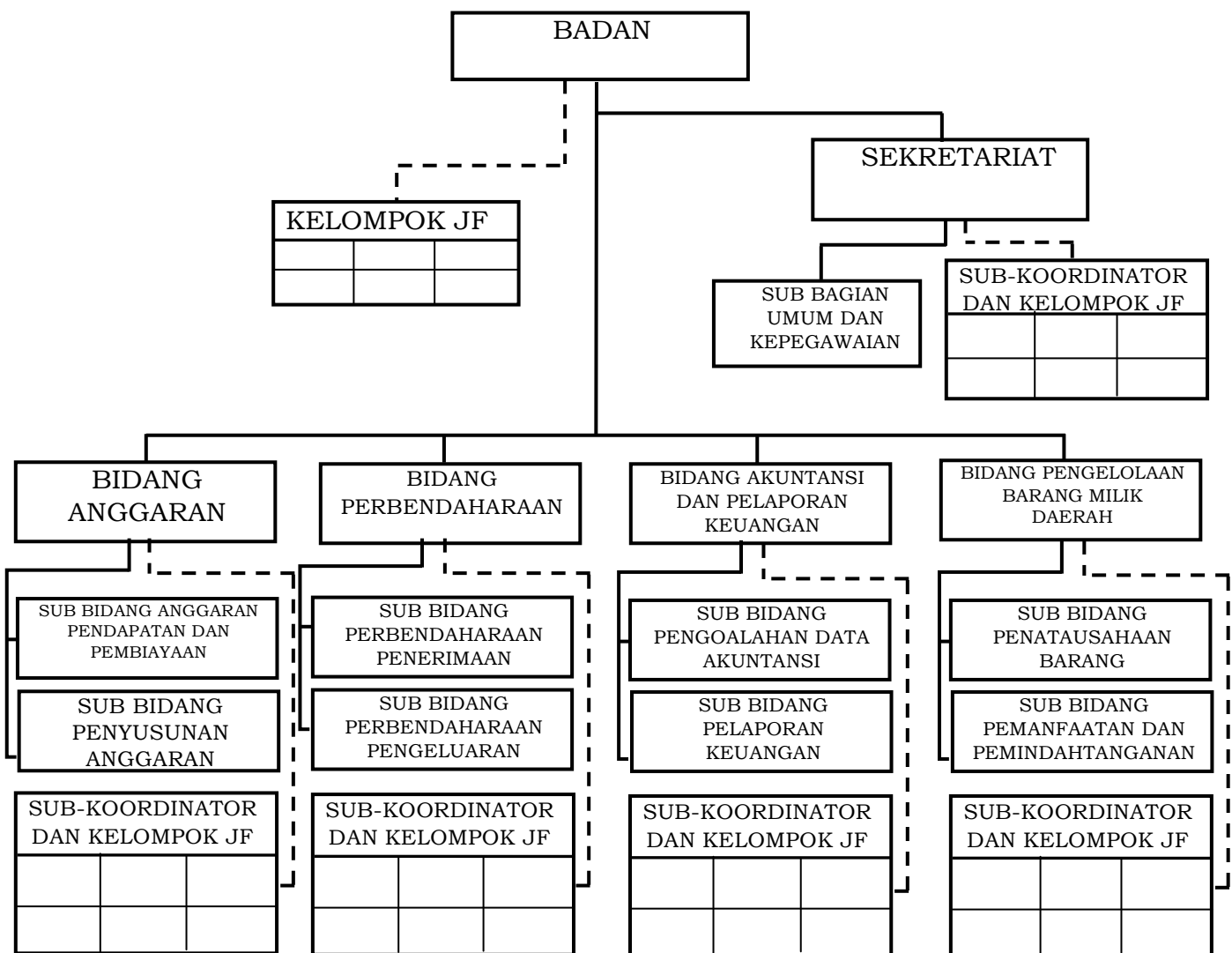
Untuk melaksanakan tugas pokok, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan daerah;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
- c. pengoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan;
- d. pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati di bidang tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 2.1.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 110 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang, sebagai berikut :

Bagan II.1 Struktur Organisasi  
Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang



Adapun tugas kepala badan, sekretaris dan masing-masing bidang sebagai berikut :

#### 1) Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan daerah. Dalam menjalankan tugas tersebut, Kepala Badan

menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan daerah;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
- c. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Pengelola Keuangan Daerah;
- d. pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati di bidang tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

## **2) Sekretariat**

Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Badan Pengelola Keuangan Daerah berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penyusunan program dan kegiatan Badan yang selanjutnya ditetapkan sebagai pedoman kerja;
- b. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran, dan perundang-undangan;
- c. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kerjasama, dan hubungan masyarakat;
- d. Pengelolaan urusan rumah tangga;
- e. Pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan dan peningkatan karier pegawai;
- f. Penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;
- g. Penyusunan rencana dan pelaksanaan sistem pengendalian intern;
- h. Penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan Badan;
- i. Pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana;
- j. Pengelolaan barang milik/kekayaan daerah;

- k. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas - tugas bidang;
- l. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana;
- m. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan; dan
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Tugas dan fungsi Sub Bagian yang berada di bawah Sekretariat, sebagai berikut:

- **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

- a. menyusun rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. menyusun rencana kebutuhan pegawai dan melaksanakan administrasi kepegawaian;
- c. menyusun rencana kebutuhan pegawai dan pelatihan pegawai;
- d. menyiapkan dan koordinasi penyusunan rencana kebutuhan barang dan rencana pemeliharaan barang Badan;
- e. melaksanakan koordinasi pengelolaan, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Badan;
- f. melaksanakan penatausahaan barang milik daerah di lingkungan Badan;
- g. melaksanakan urusan rumah tangga, surat-menyurat, dan kearsipan Badan;
- h. melaksanakan urusan kerja sama, hubungan masyarakat, dan keprotokolan Badan;
- i. melaksanakan koordinasi penyediaan dan pengelolaan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- j. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

### **3) Bidang Anggaran**

Bidang Anggaran mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan anggaran pendapatan, belanja, serta pembiayaan. Untuk melaksanakan tugas Bidang Anggaran, mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Anggaran yang selaras dengan Rencana Strategi dan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis Bidang Anggaran;
- c. pengkoordinasian dan penyusunan KUA dan PPAS, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS;

- d. pengkoordinasian, penyusunan, dan verifikasi RKA-SKPD/Perubahan RKA-SKPD;
- e. pengkoordinasian, penyusunan, dan verifikasi DPA-SKPD/Perubahan DPA-SKPD;
- f. pengkoordinasian dan penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD;
- g. pengkoordinasian dan penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD;
- h. pengkoordinasian dan penyusunan regulasi serta kebijakan Bidang Anggaran;
- i. pengkoordinasian perencanaan anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- j. pembinaan penganggaran daerah;
- k. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Kepala Bahan;
- l. pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Badan;
- m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Tugas Sub Bidang yang berada di bawah Bidang Anggaran sebagai berikut:

- (1) Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan,** mempunyai tugas :
- a. merumuskan dan menyusun rencana kerja Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan;
  - b. melaksanakan penyusunan dan pembahasan RKA-SKPD dan Perubahan RKA-SKPD, termasuk BLUD dan PPKD;
  - c. melaksanakan penyiapan bahan persetujuan dan pengesahan DPA-SKPD dan Perubahan DPA-SKPD;
  - d. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang Anggaran; dan
  - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran.

**(2) Sub Bidang Penyusunan Anggaran** , mempunyai tugas :

- a. merumuskan dan menyusun rencana kerja Sub Bidang Penyusunan Anggaran;
- b. menyusun rancangan KUA dan PPAS, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS;
- c. menyusun anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah;
- d. melaksanakan koordinasi dan kompilasi bahan-bahan penyusunan jawaban eksekutif dalam rangka penyusunan Raperda tentang APBD dan Raperda tentang Perubahan APBD;
- e. melaksanakan penyempurnaan Raperda tentang APBD dan Raperda tentang Perubahan APBD;
- f. melaksanakan penyiapan penetapan Raperda tentang APBD dan Raperda tentang Perubahan APBD;
- g. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang Anggaran; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran.

**4) Bidang Perbendaharaan :**

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Perbendaharaan;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis Bidang Perbendaharaan;
- c. perencanaan dan pengendalian dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- d. penyusunan dan pelaksanaan peraturan pelaksanaan dan pengendalian APBD dan Perubahan APBD;
- e. pelaksanaan tugas-tugas Kuasa Bendahara Umum Daerah;
- f. pelaksanaan bimbingan teknis penatausahaan keuangan daerah;
- g. pelaksanaan monitoring pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD;
- h. penyusunan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan;
- i. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan;
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.



Tugas Sub Bidang di bawah Bidang Perbendaharaan, sebagai berikut :

**(1) Sub Bidang Perbendaharaan Penerimaan**, mempunyai tugas :

- a. merumuskan dan menyusun rencana kerja Sub Bidang Perbendaharaan Penerimaan;
- b. melaksanakan penatausahaan penerimaan daerah;
- c. meneliti kebenaran laporan Surat Pertanggungjawaban Fungsional bendahara penerimaan;
- d. melaksanakan pembinaan perbendaharaan penerimaan pada SKPD;
- e. melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen persyaratan penyaluran pendapatan transfer;
- f. melaksanakan rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran pendapatan transfer dengan instansi terkait;
- g. melaksanakan pengesahan atas penerimaan dan pengeluaran daerah yang tidak melalui rekening kas daerah;
- h. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Perbendaharaan;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perbendaharaan.

**(2) Sub Bidang Perbendaharaan Pengeluaran** mempunyai tugas:

- a. merumuskan dan menyusun rencana kerja Sub Bidang Perbendaharaan Pengeluaran;
- b. meneliti kelengkapan surat perintah membayar dan menerbitkan surat perintah pencairan dana;
- c. melaksanakan pemindahbukuan berdasarkan permintaan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
- d. melaksanakan pengadministrasian pemungutan dan pemotongan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan rekonsiliasi pengeluaran kas berdasarkan SP2D dengan SKPD dan instansi terkait;
- e. meneliti kebenaran laporan surat pertanggungjawaban fungsional bendahara pengeluaran;
- f. melaksanakan anggaran kas bendahara umum daerah;
- g. melaksanakan penatausahaan surat penyediaan dana;

- h. meneliti kelengkapan dokumen Surat keterangan penghentian pembayaran/SKPP serta melaksanakan proses penerbitan SKPP;
- i. melaksanakan penelitian kelengkapan dan pemutakhiran daftar gaji SKPD;
- j. melaksanakan pembinaan perbendaharaan pengeluaran pada SKPD;
- k. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Perbendaharaan;
- l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perbendaharaan.

#### **5) Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan**

Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
- b. penyelenggaraan sistem akuntansi pemerintah daerah;
- c. pelaksanaan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. pelaksanaan pembinaan dan pemberian pedoman dalam rangka implementasi sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah dan badan layanan umum daerah;
- e. pelaksanaan pengumpulan data laporan keuangan badan usaha milik daerah dan ikhtisar laporan keuangan pemerintah desa;
- f. pelaksanaan penyusunan analisis dan evaluasi atas kinerja keuangan pemerintah daerah;
- g. pendistribusian laporan keuangan pemerintah daerah;
- h. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Tugas Sub Bidang yang berada di bawah Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, sebagai berikut :

**(1) Sub Bidang Pengolahan Data Akuntansi,** mempunyai tugas:

- a. merumuskan dan menyusun rencana kerja Sub Bidang Pengolahan Data Akuntansi;
- b. menerima, memverifikasi, mengolah dan mendokumentasikan seluruh dokumen sumber/bukti transaksi realisasi anggaran pendapatan Laporan Realisasi Anggaran, belanja, dan pembiayaan;
- c. menerima, memverifikasi, mengolah dan mendokumentasikan seluruh dokumen sumber/bukti transaksi finansial meliputi pendapatan laporan operasional, beban, asset, kewajiban, dan ekuitas;
- d. melaksanakan evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan proses pengolahan data transaksi akuntansi anggaran dan transaksi akuntansi finansial;
- e. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

**(2) Sub Bidang Pelaporan Keuangan,** mempunyai tugas:

- a. merumuskan dan menyusun rencana kerja Sub Bidang Pelaporan Keuangan;
- b. mengkoordinasikan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- c. melaksanakan rekonsiliasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- d. mengkonsolidasikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- e. menyusun laporan keuangan bulanan, tribulan, semester dan akhir tahun;
- f. menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang meliputi:
  1. laporan realisasi anggaran;
  2. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
  3. neraca;

4. laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.
- g. menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pelaksanaan APBD;
- h. mengevaluasi laporan keuangan SKPD dan Badan Layanan Umum Daerah;
- i. mengkoordinasikan pengumpulan data laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah;
- j. mengkoordinasikan pengumpulan data laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah;
- k. mendistribusikan laporan keuangan kepada pemangku kepentingan;
- l. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
- m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

## **6) Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah**

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengelolaan asset;
- c. penyusunan rencana kebutuhan barang daerah;
- d. pelaksanaan inventarisasi barang daerah;
- e. pelaksanaan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang daerah;
- f. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Tugas Sub Bidang yang berada di bawah Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagai berikut :

### **(1) Sub Bidang Penatausahaan Barang**, mempunyai tugas:

- a. merumuskan dan menyusun rencana kerja Sub Bidang Penatausahaan Barang;

- b. mengumpulkan dan entry data laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan dan 5 (lima) tahunan dari SKPD;
- c. menyusun Laporan Barang Milik Daerah pada akhir tahun sebagai bahan penyusunan neraca;
- d. menyimpan dan menghimpun bukti kepemilikan barang milik daerah;
- e. melaksanakan pembinaan dan koordinasi dengan pengurus barang SKPD;
- f. melaksanakan sensus barang daerah;
- g. melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja Sub Bidang Penatausahaan Barang;
- h. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

(4) **Sub Bidang Pemanfaatan dan Pemindahtanganan**, mempunyai tugas:

- a. merumuskan dan menyusun rencana kerja Sub Bidang Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Daerah;
- b. meneliti dan memproses rencana pinjam pakai, atau kerja sama, pemanfaatan, bangunan guna serah atau bangun serah guna, dan kerjasama prasarana infrastruktur barang milik daerah yang tidak berada dalam penguasaan Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna/SKPD;
- c. meneliti dan memproses rencana penjualan dan tukar menukar, hibah serta penyertaan modal barang berupa tanah, dan/atau bangunan milik daerah;
- d. meneliti dan memproses rencana penjualan dan tukar menukar, hibah serta penyertaan modal barang milik daerah selain tanah, dan/atau bangunan yang tidak berada dalam penguasaan pengguna dan/atau kuasa pengguna SKPD;
- e. menyusun dan merumuskan draft Surat Keputusan Penghapusan Barang Daerah;
- f. meneliti usulan pemanfaatan maupun pemindahtangan barang selain tanah dan bangunan dari SKPD;

- g. memberikan saran dan pertimbangan terhadap permasalahan yang menyangkut kerugian daerah;
- h. melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja pemanfaatan dan pemindahtanganan barang daerah;
- i. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

## **2.2 Sumber Daya Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang**

Untuk mencapai tujuan organisasi, Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang memanfaatkan berbagai sumber daya meliputi sumber daya manusia, mesin dan peralatan, teknologi informasi sebagai berikut :

## 1) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia atau pegawai yang ada di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang secara keseluruhan sebanyak 65 orang terdiri dari PNS sebanyak 35 orang dan Tenaga Upah Bulanan (Non PNS) sebanyak 30 orang, dengan klasifikasi sebagai berikut :

Tabel II.1 Sumber Daya Manusia atau pegawai Badan Pengelola Keuangan Daerah Menurut Tingkat Pendidikan dan status kepegawaian :

Jenjang Pendidikan	PNS			NON PNS			Total		
	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
Pasca Sarjana	2	1	3	0	0	0	2	1	3
Sarjana (S1)	6	9	15	7	10	17	13	19	32
Akademi/ D3	5	1	6	3	0	3	8	1	9
SLTA	7	3	10	6	2	8	13	5	18
SLTP	1	0	1	1	0	1	2	0	2
SD	0	0	0	1	0	1	1	0	1
Jumlah	21	14	35 Orang	18	12	30 Orang	39	26	65 Orang

Tabel II.2 Sumber Daya Manusia atau pegawai Badan Pengelola Keuangan Daerah Menurut Pendidikan Penjenjangan

Jenjang Diklat	Jumlah	Laki	Perempuan
1. Diklat Pim II	-	-	-
2. Diklat Pim III	2 orang	2	0
3. Diklat Pim IV	12 orang	8	4
Jumlah	14 orang	10	4

Tabel II.3 Sumber Daya Manusia atau pegawai Badan Pengelola Keuangan Daerah Menurut Golongan

Golongan	Jumlah	Laki Laki	Perempuan
1. Golongan IV/b	2 Orang	2	2
2. Golongan IV/a	3 Orang	2	2
3. Golongan III/d	11 Orang	6	6
4. Golongan III/c	2 Orang	1	1
5. Golongan III/b	5 Orang	1	1
6. Golongan III/a	4 Orang	3	3
7. Golongan II/d	2 Orang	1	1
8. Golongan II/c	5 Orang	5	5
9. Golongan II/b	1 Orang	1	1
10. Golongan II/a	0	0	0
Jumlah	35 orang	22	13

## 2) Sarana dan Prasarana

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang memiliki sarana dan prasarana antara lain bangunan fisik berupa gedung yang bertempat di Jalan Alun Alun Utara No. 7 Lumajang.

Tabel II.4 Sarana dan Prasarana Badan Pengelola Keuangan Daerah

No	Jenis Barang	Jumlah (unit)
1	Kendaraan roda empat	4 Unit
2	Kendaraan roda dua	53 Unit
3	Komputer PC	80 Unit
4	Note Book	24 Unit
5	UPS	60 Unit
6	Server	7 Unit
7	Printer	83 Unit
8	Scanner	9 Unit
9	Air Conditioning	26 Unit
10	Pesawat Telepon	3 Unit
11	LCD Proyektor	3 Unit
12	Televisi	5 Unit



### **3) Teknologi Informasi**

Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang dalam melaksanakan tugas pengelolaan keuangan daerah telah memanfaatkan teknologi informasi sebagai berikut :

- a. Sistem Informasi Pengelolaan Daerah (SIPD) Anggaran merupakan aplikasi yang digunakan untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sekaligus penyusunan APBD.
- b. Sistem Informasi Pengelolaan Daerah (SIPD) Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan.
- c. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) merupakan aplikasi yang digunakan untuk penatausahaan keuangan daerah dan sistem pelaporan keuangan daerah, karena SIPD untuk penatausahaan dan pelaporan belum optimal.
- d. Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (Simbada) merupakan aplikasi yang digunakan untuk melaksanakan pengelolaan barang milik daerah.
- e. Sistem Informasi Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (SIP-BOS) merupakan aplikasi yang digunakan untuk mengelola keuangan Dana BOS pada lembaga sekolah SD/SMP Negeri di Kabupaten Lumajang.

#### **2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Kegiatan pelayanan di bidang pengelolaan keuangan daerah meliputi penyiapan bahan penyusunan dan kebijakan keuangan daerah berupa pemberian pedoman penyusunan anggaran, pedoman penatausahaan keuangan daerah, pedoman pelaporan keuangan SKPD. Selain melakukan pembinaan berupa sosialisasi dan pembinaan teknis di bidang pengelolaan keuangan daerah, sedangkan pengelolaan aset daerah berupa pemberian pedoman penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah, pedoman penatausahaan dan penyusunan aset, serta pembinaan pengelolaan aset/barang daerah. Dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan aset/barang daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang mengikuti peraturan perundangundangan yang berlaku.

Tolok ukur kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang tahun 2019-2023 adalah meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, dengan indikator Opini BPK dan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah. Untuk terealisasinya indikator tersebut telah ditetapkan sasaran yaitu mempertahankan ketertiban administrasi pengelolaan keuangan daerah dengan indikator sebagai berikut :

- a. Persentase ketepatan waktu penyampaian Raperda APBD;
- b. Persentase ketepatan waktu penyampaian Raperda Perubahan APBD;
- c. Persentase ketepatan waktu penyampaian LKPD ke BPK RI; dan
- d. Persentase ketepatan waktu penyampaian Perda Pertanggungjawaban APBD.

Kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah dari tahun ke tahun semakin lebih baik dengan pencapaian yang diperoleh atas opini BPK pada Kabupaten Lumajang dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sejak tahun 2019 hingga tahun 2022. Berikut ditampilkan pencapaian kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang dalam kurun waktu tahun 2019-2022 terlihat pada tabel II.5 (T-C. 23) serta realisasi pendanaan dari tahun 2019-2022 pada tabel II.6 (Tabel T-C. 24) sebagai berikut :

Tabel II.5 (T-C.23)  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan Daerah  
Kabupaten Lumajang

No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	<b>Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Raperda APBD</b>	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	-
2	<b>Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Perubahan APBD</b>	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	-
3	<b>Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kepada BPK-RI</b>	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	-
4	<b>Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Pertanggung-jawaban APBD</b>	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	-
	Persentase ketepatan waktu penyusunan Raperda APBD	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	-
	Persentase ketepatan waktu penyusunan Raperda Perubahan APBD	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	-
	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	-
	Persentase ketepatan waktu Laporan Penatausahaan BUD	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	-
	Persentase Ketepatan Waktu Laporan Barang Milik Daerah	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99%	92%	-	100%	100%	99%	92%	-
	Prosentase ketepatan waktu penyusunan LKPD	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	-

Tabel II.6 (T-C. 24)  
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	3,517,140,850	-	-	-	-	3,410,335,498	-	-	-	-	97%	-	-	-	-	0	0
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	3,070,953,400	-	-	-	-	3,041,446,835	-	-	-	-	99%	-	-	-	-	0	0
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	46,980,000	-	-	-	-	41,737,500	-	-	-	-	89%	-	-	-	-	0	0
ROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENYUSUNAN PERENCANAAN ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH	2,185,039,500	-	-	-	-	2,028,974,827	-	-	-	-	93%	-	-	-	-	0	0
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	803,741,650	-	-	-	-	646,146,600	-	-	-	-	80%	-	-	-	-	0	0
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAKSANAAN SISTEM DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	1,552,776,600	-	-	-	-	1,157,003,979	-	-	-	-	75%	-	-	-	-	0	0

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH	1,181,079,900	-	-	-	-	830,266,200	-	-	-	-	70%	-	-	-	-	0	0
PROGRAM FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	897,488,100	-	-	-	-	809,339,450	-	-	-	-	90%	-	-	-	-	0	0
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	-	2,460,769,937	-	-	-	-	2,456,947,085	-	-	-	-	99.8%	-	-	-	0	0
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	-	690,494,980	-	-	-	-	689,071,376	-	-	-	-	99.8%	-	-	-	0	0
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	-	21,284,000	-	-	-	-	20,705,000	-	-	-	-	97.3%	-	-	-	0	0
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENYUSUNAN PERENCANAAN ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH	-	1,415,771,375	-	-	-	-	1,414,931,318	-	-	-	-	99.9%	-	-	-	0	0
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	-	560,473,000	-	-	-	-	544,668,000	-	-	-	-	97.2%	-	-	-	0	0

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAKSANAAN SISTEM DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	-	997,813,500	-	-	-	-	964,694,440	-	-	-	-	96.7%	-	-	-	0	0
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH	-	525,071,500	-	-	-	-	497,353,450	-	-	-	-	94.7%	-	-	-	0	0
PROGRAM FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	-	478,087,000	-	-	-	-	476,823,000	-	-	-	-	99.7%	-	-	-	0	0
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	-	-	52,951,398,068	50,054,690,749	119,610,616,149	-	-	48,688,760,806	38,953,999,077	-	-	-	92%	78%	-	0.67	-0.20
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	-	-	391,528,349,137	391,166,230,558	432,254,512,611	-	-	385,111,173,877.12	383,607,450,145.14	-	-	-	98%	98%	-	0.05	0.00
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	-	-	764,022,450	1,875,783,000	1,565,968,790	-	-	599,569,130	1,655,768,963	-	-	-	78%	88%	-	0.64	1.76

## 2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Sesuai pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam hal ini dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah (Badan Pengelola Keuangan Daerah) sebagai unsur staf selain melaksanakan tugas sebagai SKPD, Badan Pengelola Keuangan Daerah juga melaksanakan tugas lain, diantaranya :

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
- b. Menyusun Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;
- c. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD);
- d. Menyusun Laporan Keuangan Daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- e. Mengesahkan DPA-SKPD;
- f. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- g. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
- h. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas;
- i. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan Pejabat Pengguna
- j. Anggaran atas beban Rekening Kas Umum Daerah;
- k. Menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD).

Memperhatikan beberapa tugas tersebut, untuk menunjang kelancaran pelaksanaannya Badan Pengelola Keuangan Daerah memberikan fasilitasi dan pelayanan kepada seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang mulai dari :

- a. Perencanaan anggaran, antara lain penyusunan program dan anggaran, penyusunan Rancangan Kerja dan Anggaran/Rencana Kerja Perubahan dan Anggaran (RKA/RKPA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPA/DPPA) ;
- b. Pelaksanaan dan Penatausahaan, antara lain penerbitan SPD, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), pembayaran gaji dan tunjangan PNS, pengecekan pembebanan rekening belanja dan ketersediaan dana ;

- c. Penyusunan laporan, meliputi penyusunan laporan keuangan daerah selaku entitas pelaporan atas laporan keuangan Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku entitas akuntansi.

Sehingga Kelompok Sasaran Layanan Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah Perangkat Daerah se-Kabupaten Lumajang termasuk pelayanan bantuan pencairan bantuan keuangan umum dan khusus kepada 198 Desa se-Kabupaten Lumajang.

## 2.5 Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan

Mitra Badan Pengelola Keuangan Daerah dalam pemberian layanan adalah sebagai berikut :

1. PT. Taspen, pemberian layanan terkait dengan pemotongan dan penyeteroran iuran wajib pegawai (IWP)
2. Bank Jatim, Pemberian layanan terkait dengan pengelolaan Rekening Umum Daerah (RKUD)
3. BPJS Kesehatan, Pemberian layanan terkait dengan pemotongan dan penyeteroran Iuran BPJS Kesehatan

## 2.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah PD Semeru. Terkait penyertaan modal yang masuk dalam pengeluaran pembiayaan pada APBD Kabupaten Lumajang. Dan terkait dengan jasa deviden yang masuk dalam penerimaan pembiayaan pada APBD Kabupaten Lumajang

## 2.7 Kerjasama Perangkat Daerah

Tabel II.7 Kerjasama Perangkat Daerah

No	Judul Perjanjian Kerja Sama	Mitra Kerja Sama	Tahun Perjanjian Kerja Sama	Nomor Perjanjian Kerja Sama	Jangka Waktu Kerja Sama	Bentuk Kerja Sama
1	PENGELOLAAN REKENING UANG DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG ANTARA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN	PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Lumajang	2008	Nomor : 916/643/427.36/2008 Nomor : 046/10/Bj/Ci/III/2008	sejak ditandatangani bersama Sampai dengan adanya perubahan/ kesepakatan baru oleh para pihak	a. Pembukaan Rekening b. Penarikan dan Peyetoram Dana c. Bunga/ Jasa giro d. Hak dan



No	Judul Perjanjian Kerja Sama	Mitra Kerja Sama	Tahun Perjanjian Kerja Sama	Nomor Perjanjian Kerja Sama	Jangka Waktu Kerja Sama	Bentuk Kerja Sama
	LUMAJANG DENGAN PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR CABANG LUMAJANG					Kewajiban e. Penyelesaian perselisihan

Perjanjian Kerjasama pengelolaan rekening uang daerah Pemerintah Kabupaten Lumajang antara Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Lumajang dimulai sejak tahun 03 maret 2008. Perjanjian kerjasama berlaku sampai dengan adanya perubahan/ kesepakatan baru oleh para pihak. Kerjasama dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 39 Tahun 2007 tanggal 16 Juli 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah. Perjanjian Kerjasama diantaranya berisi tentang :

- Penunjukan pembukaan rekening , PT. Bank Jatim Lumajang sebagai tempat pembukaan rekening Kas Umum Daerah, rekening Pengeluaran daerah, rekening penerimaan daerah dan tempat penyimpanan uang Pemerintah Kabupaten Lumajang,

### **BAB III**

## **PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

### **3.1 Permasalahan Pelayanan**

Badan Pengelola Keuangan Daerah merupakan organisasi perangkat daerah yang mempunyai fungsi melaksanakan pengelolaan keuangan daerah, yaitu keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban keuangan daerah. Badan Pengelola Keuangan Daerah sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah disamping sebagai perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang daerah, juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

Badan Pengelola Keuangan Daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah berlandaskan pada azas umum pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang memenuhi azas umum pengelolaan keuangan daerah, Badan Pengelola Keuangan Daerah memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada baik sumber daya manusia, sumber dana, mesin dan peralatan, teknologi informasi dan berbagai regulasi sebagai landasan hukum pelaksanaannya. Pemanfaatan berbagai sumber daya tersebut di harapkan Badan Pengelola Keuangan Daerah dapat melaksanakan tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, penyusunan rancangan APBD dan perubahannya, melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah, melakukan pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah serta menyusun laporan keuangan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Tabel III.1 Penetapan Isu Badan Pengelola Keuangan Daerah

Penetapan Isu PD (T-B. 35)		
Masalah pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Belum optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi	Kapasitas SDM pengelola keuangan dan barang milik daerah kurang memadai.
		Belum optimalnya verifikasi penatausahaan keuangan SKPD dan SKPKD
		Belum optimalnya penerapan SIPD dan SIPKD
		Sering berubahnya regulasi dan kebijakan pengelolaan keuangan daerah
		Pengelolaan BMD belum optimal.

Dalam rangka melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah, Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang di hadapkan pada isu-isu permasalahan sebagai berikut :

1. Idealnya SDM Pengelola Keuangan dan BMD memiliki kompetensi yang dapat mendukung tercapainya pengelolaan keuangan dan BMD yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Faktanya SDM yang ada tidak sepenuhnya memiliki kemampuan yang memadai sebagai syarat untuk dapat melaksanakan pengelolaan keuangan dan BMD baik;
2. PPK SKPD yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. Tugas dan wewenangnya adalah melakukan verifikasi SPP, menyiapkan SMP, Verifikasi SPJ bendahara penerimaan / pengeluaran, melaksanakan fungsi akuntansi SKPD dan menyusun laporan keuangan SKPS. Faktanya tugas PPK-SKPD tidan benar-benar di jalankan sesuai ketentuan (belum optimal). Indikatornya masih banyak temuan pemeriksaan yang berkaitan dengan penetausahaan keuangan dan banyaknya koreksi kesalahan.

3. SIPD yang dibangun oleh Kementerian Dalam Negeri belum sepenuhnya dapat di implementasikan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan keuangan sampai dengan pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan. Implementasi yang berjalan saat ini baru pada tahap perencanaan dan penganggaran, sedangkan untuk penatausahaan keuangan dan akuntansi dan pelaporan keuangan belum teruji dan belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena kelemahan sistem. SIPD juga belum teruji keandalannya untuk dapat menghasilkan data transaksi dan laporan keuangan yang bersifat mandatory yang harus di kirimkan kepada DJPK Kemenkeu sebagai sarat salur Dana Transfer.
4. Regulasi dan kebijakan pengelolaan keuangan daerah sering mengalami perubahan yang berdampak pada tata kelola keuangan daerah yang selama ini sedang berjalan dan mengakibatkan beban kerja menjadi bertambah karena harus menyesuaikan dengan regulasi, misalnya :
  - a. Perubahan regulasi dana BOS menjadi DAK Non Fisik dan mengharuskan mengakomodir BOS swasta di dalam APBD dan penatausahaan dan pelaporan keuangan.
  - b. Kebijakan transaksi non tunai yang mengharuskan penyesuaian terhadap tata cara pembayaran dalam APBD dan memerlukan kesiapan SDM dan kerjasama dengan Bank tempat RKUD.
  - c. Perubahan regulasi dan kebijakan pencairan DAK Non Fisik BOK Kesehatan tidak melalui RKUD tetapi di transfer langsung ke Rek. Kas Puskesmas dan tidak berada pada bank yang sama dengan RKUD, memerlukan kesiapan untuk menyesuaikan perubahan regulasi dan kebijakan tersebut.
  - d. Perubahan regulasi dan kebijakan penyaluran DAU menjadi DAU terikat dan tidak terikat berdampak pada penyaluran DAU ke RKUD setiap bulan. Kebijakan ini menciptakan pekerjaan tambahan setiap bulan terutama pelaporan penyerapan DAU Terikat baik DAU Pendidikan, DAU Kesehatan, DAU P3K dan DAU Kelurahan. Perubahan ini merupakan tambahan beban kerja yang tidak bisa di hindari mengingat kelalaian atas pelaporan atas DAU tersebut berdampak pada penundaan penyaluran DAU.

- e. Perubahan regulasi dan kebijakan penyaluran Dana Bagi Hasil yang semula seluruhnya secara tunai menjadi penyaluran secara tunai dan non tunai mengakibatkan BUD harus berhati-hati dalam melaksanakan tata kelola kas daerah agar setiap bulan tersedia dana yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran daerah.
5. Pengelolaan Barang Milik Daerah belum optimal, disebabkan
- a. Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Kurang Tertib
  - b. Penatausahaan Barang Milik Daerah Kurang Tertib
  - c. Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Kurang Tertib

### **3.2. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS.**

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, kemudian dapat diuraikan beberapa isu strategis yang menjadi faktor yang paling menentukan dalam melaksanakan pembangunan jangka menengah sebagaimana tertuang dalam renstra ini. Berdasarkan hasil telaah, maka isu-isu strategis atau permasalahan yang ada di BPKD adalah: Tata Kelola Pengelolaan Keuangan Daerah belum optimal.

Tata Kelola Pengelolaan Keuangan Daerah belum optimal diantaranya dilihat dari realisasi penyerapan anggaran tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan, berarti terdapat permasalahan dalam tahap pelaksanaan dan penatausahaan di Kabupaten Lumajang. Serta permasalahan SIPD yang belum optimal untuk pelaksanaan penatausahaan dan pelaporan. Permasalahan dalam satu tahap pengelolaan keuangan menyebabkan tata Kelola pada keseluruhan proses pengelolaan keuangan daerah menjadi tidak optimal. Kita ketahui Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi keseluruhan kegiatan dari penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, sampai pertanggungjawaban keuangan daerah. Tata Kelola keuangan daerah harus efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Tata Kelola keuangan daerah yang berkualitas dilakukan melalui upaya pengukuran kinerja keuangan daerah dengan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD). 6 Dimensi dalam IPKD yaitu :

1. kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran;
2. pengalokasian anggaran belanja dalam APBD;
3. transparansi pengelolaan keuangan daerah;
4. penyerapan anggaran,
5. kondisi keuangan daerah;
6. dan opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan Dan Sasaran**

Dengan Rencana Pembangunan Dearah (RPD) Kabupaten Lumajang Tahun 2024-2026 memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan, permasalahan dan isu strategis, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program prioritas pembangunan daerah yang disertai dengan kemampuan keuangan berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2023, yang digunakan sebagai Pedoman penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan, serta sub kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang harus dicapai oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang 3 (tiga) tahun mendatang.

Tujuan dalam RPD tahun 2024-2026 yang dapat didukung pencapaiannya oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan inovatif. Dengan sasaran optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi. Dengan indikator Tujuan Indeks Reformasi Birokrasi, dan Indikator Sasaran : Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dari uraian di atas, dapat dijelaskan secara ringkas bahwa rumusan tujuan dan sasaran Badan Pengelola Keuangan Daerah untuk tiga tahun ke depan adalah sebagai berikut

Tujuan : Optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi.

Sasaran: Mempertahankan ketertiban administrasi pengelolaan keuangan daerah.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang beserta indikator kinerjanya dalam tiga tahun ke depan disajikan dalam tabel IV.1 (Tabel T-C 25) dibawah ini :

Tabel IV.1 (T-C 25)  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Target		
					2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Predikat	<p>Nilai (kategori) Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun sebelumnya (N-2).</p> <p>Catatan : sumber data dari Keputusan Gubernur tentang hasil pengukuran IPKD. Definisi operasional dikategorikan perlu perbaikan jika nilai IPKD berada diantara nilai MEAN-(1 x standar deviasi) dan MEAN+(1 x standar deviasi)</p>	Perlu Perbaikan	Perlu Perbaikan	Perlu Perbaikan
	Mempertahankan keteriban administrasi pengelolaan keuangan - daerah	Persentase ketepatan waktu penyampaian Dokumen Keuangan Daerah (Raperda APBD, Raperda P-APBD, LKPD, Pertanggungjawaban APBD)	Persen	<p>Jumlah dokumen keuangan daerah yang disampaikan tepat waktu sesuai ketentuan dibagi jumlah dokumen keuangan daerah yang disampaikan kali seratus persen</p> <p>Catatan : yang dimaksud jml dokumen keuangan daerah adalah Raperda APBD, Raperda P-APBD, LKPD, Pertanggungjawaban APBD</p>	100%	100%	100%



## **4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah**

Tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta indikator dalam tiga tahun ke depan disajikan dalam tabel IV.2 dibawah ini :

Tabel IV.2 Cascading Kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kode	Sasaran Program /Kegiatan/Sub- Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Indikator
1	2	3	4	5	6	7	8
Optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Predikat				
	Mempertahankan keteriban administrasi pengelolaan keuangan daerah	Persentase ketepatan waktu penyampaian Dokumen Keuangan Daerah (Raperda APBD, Raperda P-APBD, LKPD, Pertanggungjawaban APBD)	Persen	<b>01</b>	<b>Terselenggaranya fasilitasi kebutuhan operasional kantor</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran</b>
				<b>01.2.01</b>	<b>Terfasilitasinya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase fasilitasi penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja</b>
				01.2.01.01	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				01.2.01.02	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kode	Sasaran Program /Kegiatan/Sub- Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Indikator
1	2	3	4	5	6	7	8
				01.2.01.03	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
				01.2.01.04	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
				01.2.01.05	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
				01.2.01.06	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
				01.2.01.07	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kode	Sasaran Program /Kegiatan/Sub- Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Indikator
1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>01.2.02</b>	<b>Terpenuhinya fasilitas administrasi keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase fasilitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>
				01.2.02.01	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
				01.2.02.02	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
				01.2.02.03	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD
				01.2.02.05	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
				01.2.02.06	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kode	Sasaran Program /Kegiatan/Sub- Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Indikator
1	2	3	4	5	6	7	8
				01.2.02.07	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
				<b>01.2.03</b>	<b>Tepenuhinya fasilitas administrasi Barang Milik Daerah</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase fasilitas Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah</b>
				01.2.03.01	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
				01.2.03.05	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
				01.2.03.06	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
				<b>01.2.05</b>	<b>Terpenuhinya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase fasilitas Administrasi Kepegawaian PD</b>
				01.2.05.02	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kode	Sasaran Program /Kegiatan/Sub- Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Indikator
1	2	3	4	5	6	7	8
				01.2.05.03	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
				01.2.05.05	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
				01.2.05.09	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
				01.2.05.10	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
				01.2.05.11	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
				<b>01.2.06</b>	<b>Terpenuhinya administrasi umum Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase fasilitasi administrasi umum Perangkat Daerah</b>
				01.2.06.01	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kode	Sasaran Program /Kegiatan/Sub- Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Indikator
1	2	3	4	5	6	7	8
				01.2.06.04	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
				01.2.06.05	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
				01.2.06.06	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
				01.2.06.07	Tersedianya Bahan/Material	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan
				01.2.06.08	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu
				01.2.06.09	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				01.2.06.10	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
				01.2.06.11	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
				<b>01.2.07</b>	<b>Terpenuhinya Barang Milik Daerah Perangkat Daerah</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase pengadaan Barang Milik Daerah</b>

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kode	Sasaran Program /Kegiatan/Sub- Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Indikator
1	2	3	4	5	6	7	8
				01.2.07.06	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
				01.2.07.08	Tersedianya Aset Tak Berwujud	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan
				<b>01.2.08</b>	<b>Terpenuhiya fasilitas Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase fasilitas Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
				01.2.08.01	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
				01.2.08.02	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
				01.2.08.04	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
				<b>01.2.09</b>	<b>Terpenuhiya pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>



Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kode	Sasaran Program /Kegiatan/Sub- Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Indikator
1	2	3	4	5	6	7	8
				01.2.09.02	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
				01.2.09.03	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya
				01.2.09.06	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
				01.2.09.08	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara
				01.2.09.09	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi
				<b>02</b>	<b>Meningkatnya kualitas penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan daerah</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>Indeks dimensi penyerapan Anggaran dalam APBD</b>  <b>Indeks Dimensi Opini BPK atas LKPD</b>

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kode	Sasaran Program /Kegiatan/Sub- Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Indikator
1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>02.2.01</b>	<b>Tercapainya Ketepatan waktu penyampaian dokumen rencana anggaran</b>	<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>	<p>Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS (tahun berikutnya) oleh Bupati kepada DPRD</p> <p>Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Raperda APBD oleh Bupati kepada DPRD</p> <p>Persentase ketepatan waktu penyusunan DPA SKPD</p> <p>Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS (tahun berjalan) oleh Bupati kepada DPRD</p> <p>Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Raperda Perubahan APBD oleh Bupati kepada DPRD</p> <p>Persentase ketepatan waktu penyusunan Perubahan DPA SKPD</p>
				02.2.01.01	Tersusunnya KUA dan PPAS	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kode	Sasaran Program /Kegiatan/Sub- Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Indikator
1	2	3	4	5	6	7	8
				02.2.01.02	Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun
				02.2.01.03	Terlaksananya Verifikasi RKA-SKPD	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi
				02.2.01.04	Terlaksananya Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi
				02.2.01.05	Terlaksananya Verifikasi DPA- SKPD	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi
				02.2.01.06	Terlaksananya Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi
				02.2.01.07	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
				02.2.01.08	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kode	Sasaran Program /Kegiatan/Sub- Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Indikator
1	2	3	4	5	6	7	8
				02.2.01.09	Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
				02.2.01.10	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan
				02.2.01.11	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
				02.2.01.12	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan
				02.2.01.13	Terlaksananya Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
				<b>02.2.02</b>	<b>tercapainya ketepatan waktu penyampaian dokumen perbendaharaan daerah</b>	<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	<b>Persentase pendapatan transfer yang disalurkan sesuai ketentuan Persentase dokumen SP2D yang diterbitkan tepat waktu</b>

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kode	Sasaran Program /Kegiatan/Sub- Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Indikator
1	2	3	4	5	6	7	8
							<b>Persentase dokumen Surat Pengesahan BUD yang diterbitkan tepat waktu</b> <b>Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Posisi Kas Bulanan</b>
				02.2.02.01	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
				02.2.02.02	Terkelolanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
				02.2.02.03	Terlaksananya Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
				02.2.02.04	Terlaksananya Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kode	Sasaran Program /Kegiatan/Sub- Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Indikator
1	2	3	4	5	6	7	8
				02.2.02.05	Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Koordinasi, Fasilitasi,Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
				02.2.02.06	Terlaksananya Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kode	Sasaran Program /Kegiatan/Sub- Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Indikator
1	2	3	4	5	6	7	8
				02.2.02.07	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
				02.2.02.09	Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kode	Sasaran Program /Kegiatan/Sub- Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Indikator
1	2	3	4	5	6	7	8
				02.2.02.10	Tersedianya Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
				02.2.02.11	Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
				<b>02.2.03</b>	<b>tercapainya ketepatan waktu penyampaian dokumen pelaporan keuangan daerah</b>	<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	<b>Persentase ketepatan waktu Penyampaian Laporan Realisasi Semester 1 dan prognosis realisasi anggaran kepada DPRD</b> <b>Persentase ketepatan waktu konsolidasi laporan keuangan SKPD</b> <b>Persentase Ketepatan waktu penyusunan dokumen Rencana Aksi atas hasil pemeriksaan BPK</b>



Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kode	Sasaran Program /Kegiatan/Sub- Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Indikator
1	2	3	4	5	6	7	8
				02.2.03.01	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
				02.2.03.02	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban
				02.2.03.03	Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
				02.2.03.04	Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kode	Sasaran Program /Kegiatan/Sub- Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Indikator
1	2	3	4	5	6	7	8
				02.2.03.05	Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
				02.2.03.06	Tersedianya Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
				02.2.03.08	Tersedianya Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
				02.2.03.09	Tersedianya Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kode	Sasaran Program /Kegiatan/Sub- Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Indikator
1	2	3	4	5	6	7	8
				02.2.03.10	Tersedianya Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
				02.2.03.11	Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
				<b>02.2.04</b>	<b>tercapainya ketepatan waktu penyampaian pengajuan pembayaran Belanja SKPKD kepada Bendahara Umum Daerah</b>	<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>Persentase ketepatan waktu penyampaian pengajuan pembayaran cicilan pokok dan bunga kepada Bendahara Umum Daerah Persentase ketepatan waktu penyampaian pengajuan pembayaran Bantuan Keuangan Desa kepada Bendahara Umum Daerah Persentase ketepatan waktu penyampaian pengajuan pembayaran Bantuan Tidak Terduga kepada Bendahara Umum Daerah</b>

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kode	Sasaran Program /Kegiatan/Sub- Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Indikator
1	2	3	4	5	6	7	8
							<b>Persentase ketepatan waktu penyampaian pengajuan pembayaran Dana Bagi Hasil kepada Bendahara Umum Daerah</b>
				02.2.04.04	Terlaksananya Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah
				02.2.04.08	Tersedianya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
				02.2.04.09	Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
				02.2.04.10	Terkelolanya Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota
				<b>02.2.05</b>	<b>Meningkatnya Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah</b>	<b>Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah</b>	<b>Persentase implementasi SIPD lingkup Keuangan Daerah</b>

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kode	Sasaran Program /Kegiatan/Sub- Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Indikator
1	2	3	4	5	6	7	8
				02.2.05.02	Terlaksananya Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah
				02.2.05.03	Terlaksananya Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
				<b>03</b>	<b>Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>Persentase nilai aset tetap yang tidak bermasalah</b>
				<b>03.2.01</b>	<b>Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen Laporan Barang Milik Daerah Persentase realisasi pengajuan penyertifikatan tanah kepada BPN
				03.2.01.01	Tersedianya Standar Harga	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kode	Sasaran Program /Kegiatan/Sub- Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Indikator
1	2	3	4	5	6	7	8
				03.2.01.02	Tersedianya Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah
				03.2.01.03	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
				03.2.01.04	Tersedianya Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
				03.2.01.05	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah
				03.2.01.06	Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah
				03.2.01.07	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah
				03.2.01.08	Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kode	Sasaran Program /Kegiatan/Sub- Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Indikator
1	2	3	4	5	6	7	8
				03.2.01.09	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
				03.2.01.10	Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
				03.2.01.11	Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
				03.2.01.12	Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun
				03.2.01.13	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Salah satu tujuan dalam RPD tahun 2024-2026 yang berkaitan langsung dengan Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi. Dengan sasaran mempertahankan keteriban administrasi pengelolaan keuangan daerah.

#### 5.1 Strategi

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan. Kebijakan adalah arah/tindakan untuk mencapai tujuan. Strategi dan arah kebijakan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang merupakan langkah-langkah dan arah yang akan diambil untuk mendukung pencapaian Tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah di dalam RPD. Sesuai dengan tujuan dan sasaran Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang, maka dirumusan strategi dengan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dengan cara meningkatkan kualitas penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah, pengelolaan barang milik daerah.

#### 5.2 Arah Kebijakan

Perumusan arah dan kebijakan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang berdasarkan strategi tersebut di atas sebagaimana tersaji pada Tabel V.1 (TC – 26) Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan berikut.

Tabel V.1 (TC- 26)  
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi	mempertahankan keteriban administrasi pengelolaan keuangan daerah	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dengan cara meningkatkan kualitas penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah, pengelolaan barang milik daerah	- Meningkatkan manajemen kinerja pemerintahan - Meningkatkan transparansi pemerintahan



Untuk mewujudkan arah kebijakan, upaya upaya yang dilakukan Badan Pengelola Keuangan Daerah diantaranya sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas SDM pengelola keuangan dan BMD dilakukan kegiatan pembinaan, sosialisasi, bimbingan teknis, FGD, Seminar, dll kepada penyusunan anggaran (RKA), bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, bendahara BOS, bendahara BLUD, Pelaksana Akuntansi / Penyusun Laporan Keuangan, Pengurus dan Pengelola BMD serta Pengguna Anggaran / Pengguna Barang.
2. Mengoptimalkan kapasitas dan peran pejabat (petugas) pengelola keuangan. Khususnya mengoptimalkan peran PPK-SKPD dalam melaksanakan penatausahaan keuangan, dilaksanakan pembinaan secara terus menerus melalui kegiatan kegiatan pembinaan, sosialisasi, bimbingan teknis, FGD berkaitan dengan tugas dan kewenangan PPK SKPD dalam melaksanakan verifikasi SPP, penerbitan SPM, verifikasi SPJ bendahara sampai dengan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan. Disamping itu juga di lakukan kegiatan rekonsiliasi data pendapatan dan belanja, rekonsiliasi saldo kas, rekonsiliasi pajak-pajak pusat dengan KPP Pratama dan KPPN Jember, Rekonsiliasi Laporan Keuangan, dll.
3. Mengoptimalkan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), dengan Mengembangkan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), dikarenakan SIPD masih belum optimal. Saat ini Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) atau e-finance tetap dikembangkan dan di gunakan sampai dengan SIPD siap di implementasikan secara penuh. Oleh karena itu pengembangan SIPKD masih berjalan disesuaikan dengan kebutuhan perubahan kebijakan Kementerian Keuangan serta pembinaan terhadap operator SIPKD masih tetap berjalan. Secara bertahap SIPKD akan ditinggalkan seiring dengan perkembangan SIPD jika benar-benar bisa di gunakan secara optimal.
4. Menyesuaikan dan mengimplementasikan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan kebijakan yang berlaku.  
  
Mengoptimalkan koordinasi dengan PD yang terdampak perubahan regulasi. Perubahan regulasi dan kebijakan tersebut di sikapi dengan kegiatan rapat-rapat sosialisasi dan koordinasi dengan OPD yang terdampak dengan perubahan regulasi, termasuk pula koordinasi

dengan Instansi/lembaga terkait seperti DJPK Kementerian Keuangan. Kanwil Ditjend Perbendaharaan Jatim, KPPN Jember, Bank Indonesia Jember, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan. Terhadap perubahan regulasi dan kebijakan tersebut juga di ikuti dengan penerbitan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati yang berkaitan dengan perubahan tata kelola keuangan daerah.

5. Mengoptimalkan pengelolaan BMD dengan :

- Meningkatkan SDM pengelolaan barang milik daerah melalui kegiatan sosialisasi/bimtek pengelolaan BMD.
- Penyusunan beberapa regulasi yang belum ada terus diupayakan untuk di lengkapi, serta implemntasi e-BMD dari Kemendagri akan diterapkan secara paralel dengan e-SIMBAD yang sudah ada.
- Aset Daerah yang dimanfaatkan pihak lain juga terus di lakukan diantaranya dengan melakukan kegiatan verifikasi dan pendataan BMD, termasuk pengamanan terhadap aset tanah melalui sertifikasi tanah juga di lakukan terus menerus berkoordinasi dengan Kantor BPN Kabupaten Lumajang.
- Untuk aset yang bermasalah secara bertahap dilakukan koordinasi dengan pihak terkait seperti Kepala Desa dan masyarakat.

6. Meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dengan mencapai target Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), langkah yang dilakukan :

- Mengopimalkan Koordinasi antar TIM IPKD, yang terdiri dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelola Keuangan Daerah, Bagian Tata Pemerintah, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Dinas Komunikasi dan Informatika, dan Inspektorat Daerah.
- Monitoring berkala atas input oleh masing masing OPD yang terlibat dalam pemenuhan IPKD.
- Memastikan di masing masing lini dokumen yang dihasilkan sesuai peraturan perundang-undangan,
- Mematuhi Batas Akhir Upload (BAU) untuk masing masing dokumen sumber

**BAB VI**  
**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN**  
**SERTA PENDANAAN**

Untuk mewujudkan pencapaian tujuan, strategi dan arah kebijakan serta sasaran yang telah dirumuskan, perlu disusun rumusan program yang selanjutnya dijabarkan ke dalam kegiatan-kegiatan disertai dengan indikator kinerja yang terukur.

Rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan serta indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif tahun 2024 sampai dengan 2026 sebagaimana tersaji pada tabel Tabel IV.1 (TC 27) di halaman berikut:

Tabel VI.1 (TC-27) Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah  
Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang

Kode	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub- Kegiatan	Program/ Kegiatan/ Sub- Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitung- an	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	<b>KEUANGAN</b>							<b>549.461.277.319</b>		<b>513.994.564.031</b>		<b>527.414.155.670</b>		<b>1.590.869.997.020</b>		
<b>01</b>	Terselenggara nya fasilitasi kebutuhan operasional kantor	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Persen	Jumlah fasilitasi kebutuhan operasional kantor yang dipenuhi dibagi Jumlah fasilitasi kebutuhan operasional kantor yang direncanakan dikali 100	100%	100%	119.151.660.371	100%	130.889.522.665	100%	143.801.170.949	100%	393.842.353.985	Sekretariat	Kab. Lumajang
<b>01.2.01</b>	Terfasilitasi nya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase fasilitasi penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Persen	Jumlah fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang dipenuhi dibagi jumlah fasilitasi dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang direncanakan dikali 100	100%	100%	42.858.000	100%	44.858.000	100%	42.858.000	100%	130.574.000	Sekretariat	Kab. Lumajang
01.2.01.01	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	2 Dokumen	4.000.000	3 Dokumen	6.000.000	2 Dokumen	4.000.000	7 Dokumen	14.000.000	Sekretariat	Kab. Lumajang

Kode	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub- Kegiatan	Program/ Kegiatan/ Sub- Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
01.2.01.02	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.187.000	1 Dokumen	3.187.000	1 Dokumen	3.187.000	3 Dokumen	9.561.000	Sekretariat	Kab. Lumajang
01.2.01.03	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen	2 Dokumen	7.998.000	2 Dokumen	7.998.000	2 Dokumen	7.998.000	6 Dokumen	23.994.000	Sekretariat	Kab. Lumajang
01.2.01.04	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	2.000.000	3 Dokumen	6.000.000	Sekretariat	Kab. Lumajang
01.2.01.05	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0	2 Dokumen	7.025.000	2 Dokumen	7.025.000	2 Dokumen	7.025.000	6 Dokumen	21.075.000	Sekretariat	Kab. Lumajang

Kode	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
01.2.01.06	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0	4 Laporan	6.190.000	4 Laporan	6.190.000	4 Laporan	6.190.000	12 Laporan	18.570.000	Sekretariat	Kab. Lumajang
01.2.01.07	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	13 Dokumen	12.458.000	13 Dokumen	12.458.000	13 Dokumen	12.458.000	39 Dokumen	37.374.000	Sekretariat	Kab. Lumajang
<b>01.2.02</b>	<b>Terpenuhiya fasilitasi administrasi keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persen</b>	<b>Jumlah fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dipenuhi dibagi jumlah fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang direncanakan dikali 100</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>115.642.986.701</b>	<b>100%</b>	<b>127.124.500.451</b>	<b>100%</b>	<b>139.754.165.577</b>	<b>100%</b>	<b>382.521.652.729</b>	Sekretariat	Kab. Lumajang
01.2.02.01	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1183 Orang	1183 Orang /Bulan	114.815.137.501	1183 Orang /Bulan	126.296.651.251	1183 Orang /Bulan	138.926.316.377,00	3549 / 12	380.038.105.129	Sekretariat	Kab. Lumajang
01.2.02.02	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	635.371.200	12 Dokumen	635.371.200	12 Dokumen	635.371.200	36 Dokumen	1.906.113.600	Sekretariat	Kab. Lumajang

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
01.2.02.03	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	158.581.000	12 Dokumen	158.581.000	12 Dokumen	158.581.000	36 Dokumen	475.743.000	Sekretariat	Kab. Lumajang
01.2.02.05	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0	1 Laporan	5.033.000	1 Laporan	5.033.000	1 Laporan	5.033.000	3 Laporan	15.099.000	Sekretariat	Kab. Lumajang
01.2.02.06	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	2 Dokumen	23.114.000	2 Dokumen	23.114.000	2 Dokumen	23.114.000	6 Dokumen	69.342.000	Sekretariat	Kab. Lumajang
01.2.02.07	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0	12 Laporan	5.750.000	12 Laporan	5.750.000	12 Laporan	5.750.000	36 Dokumen	17.250.000	Sekretariat	Kab. Lumajang

Kode	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
01.2.03	Tepenuhnya fasilitas administrasi Barang Milik Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase fasilitas administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Persen	Jumlah fasilitas Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang dipenuhi dibagi Jumlah fasilitas Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang direncanakan dikali 100	0%	100%	6.044.000	100%	6.044.000	100%	6.044.000	100%	18.132.000	Sekretariat	Kab. Lumajang
01.2.03.01	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0	2 Dokumen	2.000.000	2 Dokumen	2.000.000	2 Dokumen	2.000.000	6 Dokumen	6.000.000	Sekretariat	Kab. Lumajang
01.2.03.05	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	2 Laporan	2.024.000	2 Laporan	2.024.000	2 Laporan	2.024.000	6 Laporan	6.072.000	Sekretariat	Kab. Lumajang
01.2.03.06	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	12 Laporan	2.020.000	12 Laporan	2.020.000	12 Laporan	2.020.000	36 Laporan	6.060.000	Sekretariat	Kab. Lumajang
01.2.05	Terpenuhi administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase fasilitas Administrasi Kepegawaian PD	Persen	Jumlah fasilitas administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang dipenuhi dibagi Jumlah fasilitas administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang direncanakan dikali 100	100%	100%	38.570.000	100%	69.334.000	100%	155.774.000	100%	263.678.000	Sekretariat	Kab. Lumajang



Kode	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
01.2.05.02	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	0 Paket	-	1 Paket	24.864.000	1 Paket	24.864.000	2 Paket	49.728.000	Sekretariat	Kab. Lumajang
01.2.05.03	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0	1 Dokumen	2.030.000	1 Dokumen	2.030.000	1 Dokumen	2.030.000	3 Dokumen	6.090.000	Sekretariat	Kab. Lumajang
01.2.05.05	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0	5 Dokumen	7.840.000	5 Dokumen	7.840.000	5 Dokumen	7.840.000	15 Dokumen	23.520.000	Sekretariat	Kab. Lumajang
01.2.05.09	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	63 orang	0 Orang	-	0	-	64 Orang	51.840.000	64 Orang	51.840.000	Sekretariat	Kab. Lumajang
01.2.05.10	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0 Orang	-	0 Orang	-	10 Orang	34.600.000	10 Orang	34.600.000	Sekretariat	Kab. Lumajang
01.2.05.11	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	10 Orang	28.700.000	10 Orang	34.600.000	10 Orang	34.600.000	30 Orang	97.900.000	Sekretariat	Kab. Lumajang

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
01.2.06	Terpenuhi nya administrasi umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi administrasi umum Perangkat Daerah	Persen	Jumlah fasilitasi administrasi umum Perangkat Daerah yang dipenuhi dibagi Jumlah fasilitasi administrasi umum Perangkat Daerah yang dipenuhi dikali 100	100%	100%	1.960.881.670	100%	1.974.466.214	100%	1.991.794.372	100%	5.927.142.256	Sekretariat	Kab. Lumajang
01.2.06.01	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	10.000.000	8 Paket	10.000.000	8 Paket	10.000.000	2 Paket 4	30.000.000	Sekretariat	Kab. Lumajang
01.2.06.04	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	539.803.210	4 Paket	539.803.210	4 Paket	566.793.371	1 Paket 2	1.646.399.791	Sekretariat	Kab. Lumajang
01.2.06.05	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	963.851.460	2 Paket	977.436.004	2 Paket	1.033.205.001	6 Paket	2.974.492.465	Sekretariat	Kab. Lumajang
01.2.06.06	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	0	24 Dokumen	5.160.000	24 Dokumen	5.160.000	24 Dokumen	3.120.000	7 Dokumen 2 0	13.440.000	Sekretariat	Kab. Lumajang
01.2.06.07	Tersedianya Bahan/Material	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	7.500.000	2 Paket	7.500.000	2 Paket	7.500.000	6 Paket	22.500.000	Sekretariat	Kab. Lumajang
01.2.06.08	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	28.145.000	12 Laporan	28.145.000	12 Laporan	28.145.000	3 Laporan 6	84.435.000	Sekretariat	Kab. Lumajang

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
01.2.06.09	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	394.282.000	12 Laporan	394.282.000	12 Laporan	330.891.000	36 Laporan	1.119.455.000	Sekretariat	Kab. Lumajang
01.2.06.10	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0	50 Dokumen	4.700.000	50 Dokumen	4.700.000	50 Dokumen	4.700.000	1500 Dokumen	14.100.000	Sekretariat	Kab. Lumajang
01.2.06.11	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0	4 Dokumen (Tribulan)	7.440.000	4 Dokumen (Tribulan)	7.440.000	4 Dokumen (Tribulan)	7.440.000	12 Dokumen (Tribulan)	22.320.000	Sekretariat	Kab. Lumajang
<b>01.2.07</b>	<b>Terpenuhinya Barang Milik Daerah Perangkat Daerah</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase pengadaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Persen</b>	<b>Jumlah Barang Milik Daerah yang dipenuhi dibagi Jumlah Barang Milik Daerah yang direncanakan dikali 100</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>	<b>110.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>185.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>347.500.000</b>	<b>100%</b>	<b>642.500.000</b>	Sekretariat	Kab. Lumajang
01.2.07.06	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	0 Unit	-	11 Unit	85.000.000	26 Unit	247.500.000	37 Unit	332.500.000	Sekretariat	Kab. Lumajang
01.2.07.08	Tersedianya Aset Tak Berwujud	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	0	1 Aplikasi	110.000.000	1 Aplikasi	100.000.000	1 Aplikasi	100.000.000	3 Aplikasi	310.000.000	Sekretariat	Kab. Lumajang

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
01.2.08	Terpenuhi nya fasilitasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	Jumlah fasilitasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipenuhi dibagi Jumlah fasilitasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang direncanakan dikali 100	100%	100%	799.610.000	100%	799.610.000	100%	822.325.000	100%	2.421.545.000	Sekretariat	Kab. Lumajang
01.2.08.01	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	15.810.000	12 Laporan	15.810.000	12 Laporan	15.810.000	36 Laporan	47.430.000	Sekretariat	Kab. Lumajang
01.2.08.02	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	454.300.000	12 Laporan	454.300.000	12 Laporan	477.015.000	36 Laporan	1.385.615.000	Sekretariat	Kab. Lumajang
01.2.08.04	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	329.500.000	12 Laporan	329.500.000	12 Laporan	329.500.000	36 Laporan	988.500.000	Sekretariat	Kab. Lumajang
01.2.09	Terpenuhi nya pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persen	Jumlah Barang Milik Daerah yang mendapatkan pemeliharaan dibagi Jumlah Barang Milik Daerah yang direncanakan pemeliharaan dikali 100	100%	100%	550.710.000	100%	685.710.000	100%	680.710.000	100%	1.917.130.000	Sekretariat	Kab. Lumajang

Kode	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
01.2.09.02	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	45 Unit	30 Unit	162.160.000	30 Unit	162.160.000	30 Unit	162.160.000	90 Unit	486.480.000	Sekretariat	Kab. Lumajang
01.2.09.03	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Unit	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	0	1 Unit	15.850.000	1 Unit	15.850.000	1 Unit	15.850.000	3 Unit	47.550.000	Sekretariat	Kab. Lumajang
01.2.09.06	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	82 Unit	47 Unit	47.700.000	47 Unit	47.700.000	47 Unit	47.700.000	141 Unit	143.100.000	Sekretariat	Kab. Lumajang
01.2.09.08	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	3 Aplikasi	5 Aplikasi	325.000.000	4 Aplikasi	260.000.000	7 Aplikasi	455.000.000	7 Aplikasi	1.040.000.000	Sekretariat	Kab. Lumajang
01.2.09.09	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir rehabilitasi	Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir rehabilitasi	1 Gedung	0 Gedung	-	1 Gedung	200.000.000	0 Gedung	-	1 Gedung/ Bangunan	200.000.000	Sekretariat	Kab. Lumajang

Kode	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub- Kegiatan	Program/ Kegiatan/ Sub- Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
02	Meningkatnya kualitas penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan daerah	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Indeks dimensi penyerapan Anggaran dalam APBD	Angka	Skor rata rata dari penjumlahan jenis belanja dibagi total jenis belanja dikali bobot	15,56	15	428.526.264.664	13	381.020.872.152	13	381.320.398.586	13	1.190.867.535.402	Bidang Anggaran dan Bidang Perbendaharaan	Kab. Lumajang
			Indeks Dimensi Opini BPK atas LKPD	Angka	skor dibagi 3 dikali bobot	15	15	636.997.650	15	823.179.117	15	905.497.028	15	2.365.673.795	Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	
02.2.01	Tercapainya Ketepatan waktu penyampaian dokumen rencana anggaran	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS (tahun berikutnya) oleh Bupati kepada DPRD	Persen	Jumlah waktu Riil Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS dibagi Jumlah waktu hari maksimal Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS dikali 100%	100%	100%	42.340.800	100%	44.745.757	100%	49.220.333	100%	136.306.891	Bidang Anggaran	Kab. Lumajang
			Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Raperda APBD oleh Bupati kepada DPRD	Persen	Jumlah waktu Riil Penyampaian Raperda APBD dibagi Jumlah hari maksimal Penyampaian Raperda APBD sesuai ketentuan dikali 100%	100%	100%	1.086.882.320	100%	1.148.617.236	100%	1.263.478.959	100%	3.498.978.515		
			Persentase ketepatan waktu penyusunan DPA SKPD	Persen	Jumlah waktu Riil Penyusunan DPA SKPD dibagi Jumlah hari maksimal Penyusunan DPA SKPD sesuai ketentuan dikali 100%	100%	100%	79.868.800	100%	84.405.348	100%	92.845.883	100%	257.120.030		

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS (tahun berjalan) oleh Bupati kepada DPRD	Persen	Jumlah waktu Riil Penyampaian Rancangan KUA PPAS Perubahan dibagi Jumlah hari maksimal Penyampaian Rancangan KUA PPAS Perubahan sesuai ketentuan dikali 100%	100%	100%	50.014.200	100%	52.855.007	100%	58.140.507	100%	161.009.714		
			Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Raperda Perubahan APBD oleh Bupati kepada DPRD	Persen	Jumlah waktu Riil Penyampaian Raperda PAPBD dibagi Jumlah hari maksimal Penyampaian Raperda PAPBD sesuai ketentuan dikali 100%	100%	100%	771.438.560	100%	815.256.270	100%	896.781.897	100%	2.483.476.727		
			Persentase ketepatan waktu penyusunan Perubahan DPA SKPD	Persen	Jumlah waktu Riil Penyusunan DPA SKPD Perubahan dibagi Jumlah hari maksimal Penyusunan DPA SKPD Perubahan sesuai ketentuan dikali 100%	100%	100%	55.385.100	100%	58.530.974	100%	64.384.071	100%	178.300.145		
02.2.01.01	Tersusunnya KUA dan PPAS	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dokumen	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	42.340.800,00	2 Dokumen	44.745.757	2 Dokumen	49.220.333,18	6 Dokumen	136.306.891	Bidang Anggaran	Kab. Lumajang
02.2.01.02	Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	50.014.200,00	2 Dokumen	52.855.007	2 Dokumen	58.140.507,22	6 Dokumen	161.009.714	Bidang Anggaran	Kab. Lumajang

Kode	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub- Kegiatan	Program/ Kegiatan/ Sub- Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
02.2.01.03	Terlaksananya Verifikasi RKA-SKPD	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	5 Dokumen	5 Dokumen	322.713.000,00	5 Dokumen	341.043.098	5 Dokumen	375.147.408,24	5 Dokumen	1.038.903.507	Bidang Anggaran	Kab. Lumajang
02.2.01.04	Terlaksananya Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	2 Dokumen	3 Dokumen	145.323.000,00	3 Dokumen	153.577.346	3 Dokumen	168.935.081,04	9 Dokumen	467.835.427	Bidang Anggaran	Kab. Lumajang
02.2.01.05	Terlaksananya Verifikasi DPA- SKPD	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	4 Dokumen	4 Dokumen	79.868.800,00	4 Dokumen	84.405.348	4 Dokumen	92.845.882,62	12 Dokumen	257.120.030	Bidang Anggaran	Kab. Lumajang
02.2.01.06	Terlaksananya Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	2 Dokumen	2 Dokumen	55.385.100,00	2 Dokumen	58.530.974	2 Dokumen	64.384.071,05	6 Dokumen	178.300.145	Bidang Anggaran	Kab. Lumajang
02.2.01.07	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	6 Dokumen	5 Dokumen	156.851.600,00	5 Dokumen	165.760.771	5 Dokumen	182.336.847,97	15 Dokumen	504.949.219	Bidang Anggaran	Kab. Lumajang



Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
02.2.01.08	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	115.296.560,00	2 Dokumen	121.845.405	2 Dokumen	134.029.945,07	6 Dokumen	371.171.910	Bidang Anggaran	Kab. Lumajang
02.2.01.09	Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen	114.011.000,00	2 Dokumen	120.486.825	2 Dokumen	132.535.507,28	6 Dokumen	367.033.332	Bidang Anggaran	Kab. Lumajang
02.2.01.10	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	12 Dokumen	4 Dokumen	472.848.000,00	4 Dokumen	499.705.766	4 Dokumen	549.676.343,04	12 Dokumen	1.522.230.109	Bidang Anggaran	Kab. Lumajang
02.2.01.11	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	12 Dokumen	4 Dokumen	229.972.000,00	4 Dokumen	243.034.410	4 Dokumen	267.337.850,56	12 Dokumen	740.344.260	Bidang Anggaran	Kab. Lumajang
02.2.01.12	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	5 Dokumen	4 Dokumen	204.807.000,00	4 Dokumen	216.440.038	4 Dokumen	238.084.041,36	12 Dokumen	659.331.079	Bidang Anggaran	Kab. Lumajang

Kode	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub- Kegiatan	Program/ Kegiatan/ Sub- Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
02.2.01.13	Terlaksananya Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	60 orang	120 orang	96.498.720,00	120 orang	101.979.847	120 orang	112.177.832,03	360 orang	310.656.399	Bidang Anggaran	Kab. Lumajang
02.2.02	tercapainya ketepatan waktu penyampaian dokumen perbendaharaan daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase pendapatan transfer yang disalurkan sesuai ketentuan	Persen	Pendapatan transfer yang seharusnya diterima dikurangi penundaan pendapatan transfer dibagi pendapatan transfer yang seharusnya diterima x 100% (Berdasarkan KMK tentang penundaan transfer) Catatan : besarnya penundaan pendapatan transfer sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan penundaan transfer	100%	100%	113.949.000	100%	120.421.303	100%	132.463.434	100%	366.833.737	Bidang Perbendaharaan	Kab. Lumajang
				Persen	Jumlah dokumen SP2D yang diterbitkan tepat waktu dibagi jumlah dokumen SP2D yang diterbitkan x 100% Catatan : kriteria dokumen SP2D yang tepat waktu diterbitkan maksimal 2 hari, dokumen dalam keadaan lengkap berdasarkan register	100%	100%	410.383.800	100%	433.654.288	100%	477.019.717	100%	1.321.057.804	Bidang Perbendaharaan	

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<b>Persentase dokumen Surat Pengesahan BUD yang diterbitkan tepat waktu</b>	Persen	Jumlah dokumen surat pengesahan BUD yang diterbitkan tepat waktu dibagi jumlah dokumen surat pengesahan BUD yang diterbitkan x 100% Catatan : kriteria dokumen Surat Pengesahan BUD yang tepat waktu diterbitkan maksimal 2 hari, dokumen dalam keadaan lengkap berdasarkan regisiter penerimaan surat pengesahan Bendahara Umum Daerah	100%	100%	149.208.000	100%	157.683.014	100%	173.451.316	100%	480.342.330	Bidang Perbendaharaan	Kab. Lumajang
			<b>Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Posisi Kas Bulanan</b>		Jumlah waktu riil penyampaian laporan posisi kas bulanan dibagi jumlah hari maksimal penyampaian laporan posisi kas bulanan dikali 100%	100%	100%	74.844.000	100%	79.095.139	100%	87.004.653	100%	240.943.792		
02.2.02.01	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	25375 Dokumen	220000	149.198.000,00	220000	157.672.446	220000	173.439.691,04	660000	480.310.137	Bidang Perbendaharaan	Kab. Lumajang

Kode	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub- Kegiatan	Program/ Kegiatan/ Sub- Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
02.2.02.02	Terkelolanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0	1 laporan	149.208.000,00	1 laporan	157.683.014	1 laporan	173.451.315,84	3 laporan	480.342.330	Bidang Perbendaharaan	Kab. Lumajang
02.2.02.03	Terlaksananya Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	4 Dokumen	4 dokumen	10.728.000,00	4 dokumen	11.337.350	4 dokumen	12.471.085,44	12 dokumen	34.536.436	Bidang Perbendaharaan	Kab. Lumajang
02.2.02.04	Terlaksananya Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	0	1 dokumen	7.728.000,00	1 dokumen	8.166.950	1 dokumen	8.983.645,44	3 dokumen	24.878.596	Bidang Perbendaharaan	Kab. Lumajang
02.2.02.05	Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	25 Dokumen	347 dokumen	113.949.000,00	347 dokumen	120.421.303	347 dokumen	132.463.433,52	1041 dokumen	366.833.737	Bidang Perbendaharaan	Kab. Lumajang

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
02.2.02.06	Terlaksananya Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	0	1 dokumen	11.778.000,00	1 dokumen	12.446.990	1 dokumen	13.691.689,44	3 dokumen	37.916.680	Bidang Perbendaharaan	Kab. Lumajang
02.2.02.07	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi dan Penyelenggaraan Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi dan Penyelenggaraan Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi dan Penyelenggaraan Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi dan Penyelenggaraan Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Laporan	Jumlah Laporan Realisasi dan Penyelenggaraan Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi dan Penyelenggaraan Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	96 Laporan	96 dokumen	67.116.000,00	96 dokumen	70.928.189	96 dokumen	78.021.007,68	288 dokumen	216.065.196	Bidang Perbendaharaan	Kab. Lumajang

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
02.2.02.09	Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	12 Dokumen	12 dokumen	98.162.000,00	12 dokumen	103.737.602	12 dokumen	114.111.361,76	36 dokumen	316.010.963	Bidang Perbendaharaan	Kab. Lumajang
02.2.02.10	Tersedianya Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Dokumen	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	1 dokumen	50.252.800,00	1 dokumen	53.107.159	1 dokumen	58.417.874,94	3 dokumen	161.777.834	Bidang Perbendaharaan	Kab. Lumajang
02.2.02.11	Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	190 Orang	34 orang	90.265.000,00	34 orang	95.352.740	34 orang	104.888.014,00	34 orang	290.505.754	Bidang Perbendaharaan	Kab. Lumajang

Kode	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
02.2.03	tercapainya ketepatan waktu penyampaian dokumen pelaporan keuangan daerah	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase ketepatan waktu Penyampaian Laporan Realisasi Semester 1 dan prognosis realisasi anggaran dibagi jumlah hari maksimal penyampaian realisasi semester I dan prognosis realisasi anggaran x 100%	Persen	Jumlah waktu riil penyampaian realisasi semester I dan prognosis realisasi anggaran dibagi jumlah hari maksimal penyampaian realisasi semester I dan prognosis realisasi anggaran x 100%	100%	100%	9.360.000	100%	9.891.648	100%	10.880.813	100%	30.132.461	Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Kab. Lumajang
			Persentase ketepatan waktu konsolidasi laporan keuangan SKPD	Persen	Waktu riil penyampaian laporan keuangan dibagi jumlah hari maksimal penyampaian laporan keuangan x 100%	100%	100%	522.070.650	100%	701.724.263	100%	771.896.689	100%	1.995.691.602		
			Persentase Ketepatan waktu penyusunan dokumen Rencana Aksi atas hasil pemeriksaan BPK	Persen	Penyusunan dokumen rencana aksi atas hasil pemeriksaan BPK dilakukan pada masa pemeriksaan BPK  Catatan : Dinyatakan 100% apabila disusun tepat waktu	100%	100%	4.925.000	100%	5.204.740	100%	5.725.214	100%	15.854.954		
02.2.03.01	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	12 Laporan	12 Laporan	79.330.000,00	12 Laporan	83.835.944	12 Laporan	92.219.538,40	36 Laporan	255.385.482	Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Kab. Lumajang

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
02.2.03.02	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Pendapatan, Belanja, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	1170 Dokumen	11 04 Dokumen	57.600.000,00	11 04 Dokumen	60.871.680	11 04 Dokumen	66.958.848,00	3 3 1 2 Dokumen	185.430.528	Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Kab. Lumajang
02.2.03.03	Tersedianya Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Laporan	Jumlah Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	0	13 7 Laporan	9.360.000,00	13 7 Laporan	9.891.648	13 7 Laporan	10.880.812,80	4 1 1 Laporan	30.132.461	Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Kab. Lumajang
02.2.03.04	Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Laporan	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Laporan	2 Laporan	172.788.650,00	2 Laporan	182.603.045	2 Laporan	200.863.349,85	6 Laporan	556.255.045	Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Kab. Lumajang



Kode	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub- Kegiatan	Program/ Kegiatan/ Sub- Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
02.2.03.05	Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung jawaban awaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggung jawaban awaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota	Dokumen	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggung jawaban awaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	2 Dokumen	19.176.000,00	2 Dokumen	20.265.197	2 Dokumen	22.291.716,48	6 Dokumen	61.732.913	Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Kab. Lumajang
02.2.03.06	Tersedianya Tanggapan/ Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD	Penyusunan Tanggapan/ Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/ Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen	Jumlah Dokumen Tanggapan/ Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	4.925.000,00	1 Dokumen	5.204.740	1 Dokumen	5.725.214,00	3 Dokumen	15.854.954	Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Kab. Lumajang
02.2.03.08	Tersedianya Analisis Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD	0	1 Dokumen	3.064.000,00	1 Dokumen	3.238.035	1 Dokumen	3.561.838,72	3 Dokumen	9.863.874	Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Kab. Lumajang
02.2.03.09	Tersedianya Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Dokumen	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	0 Dokumen	-	2 Dokumen	100.000.000	-	-	2 dokumen	100.000.000	Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Kab. Lumajang

Kode	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub- Kegiatan	Program/ Kegiatan/ Sub- Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
02.2.03.10	Tersedianya Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dokumen	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	0	0 Dokumen	-	1 Dokumen	50.000.000	-	-	1 dokumen	50.000.000	Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Kab. Lumajang
02.2.03.11	Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota	Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota	183 orang	32 Orang	190.112.000,00	326 Orang	200.910.362	326 Orang	386.001.397,76	326 Orang	777.023.759	Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Kab. Lumajang
02.2.04	tercapainya ketepatan waktu penyampaian pengajuan pembayaran Belanja SKPKD kepada Bendahara Umum Daerah	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyampaian pengajuan pembayaran cicilan pokok dan bunga kepada Bendahara Umum Daerah	Persen	Jumlah dokumen SPM pembayaran cicilan pokok dan bunga yang diterbitkan tepat waktu dibagi Jumlah dokumen SPM pembayaran cicilan pokok dan bunga yang diterbitkan x 100%	100%	100%	5.666.342.268	0%	-	0%	-	0%	5.666.342.268	Sekretariat	Kab. Lumajang
				Persen	Jumlah dokumen SPM BKK yang diterbitkan tepat waktu dibagi Jumlah dokumen SPM BKK yang diterbitkan x 100%	98%	98%	332.771.211.000	98%	332.771.211.000	98%	332.771.211.000	98%	998.313.633.000		

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<p><b>Persentase ketepatan waktu penyampaian pengajuan pembayaran Bantuan Tidak Terduga kepada Bendahara Umum Daerah</b></p> <p><b>Persentase ketepatan waktu penyampaian pengajuan pembayaran Dana Bagi Hasil kepada Bendahara Umum Daerah</b></p>	<p>Persen</p> <p>Persen</p>	<p>Jumlah dokumen SPM BTT yang diterbitkan tepat waktu dibagi Jumlah dokumen SPM BTT yang diterbitkan x 100%</p> <p>Jumlah dokumen SPM Bagi Hasil yang diterbitkan tepat waktu dibagi Jumlah dokumen SPM Bagi hasil yang diterbitkan x 100%</p>	<p>98%</p> <p>100%</p>	<p>98%</p> <p>100%</p>	<p>79.800.000.000</p> <p>7.454.396.816</p>	<p>98%</p> <p>100%</p>	<p>37.800.000.000</p> <p>7.454.396.816</p>	<p>98%</p> <p>100%</p>	<p>37.800.000.000</p> <p>7.454.396.816</p>	<p>98%</p> <p>100%</p>	<p>155.400.000.000</p> <p>22.363.190.448</p>		
02.2.04.04	Terlaksananya Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	12 Laporan	12 Laporan	5.666.342.268	-	0	-	0	12 Laporan	5.666.342.268	Sekretariat	Kab. Lumajang
02.2.04.08	Tersedianya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	12 Laporan	12 Laporan	332.771.211.000	12 Laporan	332.771.211.000,00	12 Laporan	332.771.211.000,00	36 Laporan	998.313.633.000	Sekretariat	Kab. Lumajang

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
02.2.04.09	Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12 Laporan	12 Laporan	79.800.000.000	12 Laporan	37.800.000.000,00	12 Laporan	37.800.000.000,00	36 Laporan	155.400.000.000	Sekretariat	Kab. Lumajang
02.2.04.10	Terkelolanya Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	2 Laporan	2 Laporan	7.454.396.816	2 Laporan	7.454.396.816,00	2 Laporan	7.454.396.816,00	6 Laporan	22.363.190.448	Sekretariat	Kab. Lumajang
02.2.05	Meningkatnya Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase implementasi SIPD lingkup Keuangan Daerah	Persen	Jumlah modul SIPD lingkup Keuangan Daerah yang diimplementasikan dibagi Jumlah modul SIPD lingkup Keuangan Daerah x 100%	0%	100 %	100.642.000	100 %	106.358.466	100 %	116.994.312	100 %	323.994.778	Sekretariat	Kab. Lumajang
02.2.05.02	Terlaksananya Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	0%	4 Dokumen	41.192.000	4 Dokumen	43.531.706	4 Dokumen	47.884.876,16	12 Dokumen	132.608.582	Sekretariat	Kab. Lumajang
02.2.05.03	Terlaksananya Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	0%	221 Orang	59.450.000	64 Orang	62.826.760	64 Orang	69.109.436,00	349 Orang	191.386.196	Sekretariat	Kab. Lumajang

Kode	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
03	Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase nilai aset tetap yang tidak bermasalah	Persen	Nilai aset tetap dikurangi nilai aset tetap bermasalah dibagi nilai aset tetap dikali 100%	90%	90 Persen	1.146.354.634	90 Persen	1.260.990.097	90 Persen	1.387.089.107	90 Persen	3.794.433.839	Bidang Pengelolaan BMD	Kab. Lumajang
03.2.01	Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen Laporan Baranng Milik Daerah	Persen	Waktu riil penyampaian laporan Baranng Milik Daerah dibagi jumlah hari maksimal penyampaian laporan Baranng Milik Daerah x 100%	100%	100 Persen	746.354.634	100 Persen	860.990.097	100 Persen	987.089.107	100 Persen	3.394.433.839	Bidang Pengelolaan BMD	Kab. Lumajang
			Persentase realisasi pengajuan penyertifikatan tanah kepada BPN		Jumlah pengajuan penyertifikatan tanah kepada BPN dibagi jumlah target penyertifikatan tanah kepada BPN x 100%	100%	100 Persen	400.000.000	100 Persen	400.000.000	100 Persen	400.000.000	100 Persen	400.000.000	Bidang Pengelolaan BMD	
03.2.01.01	Tersedianya Standar Harga	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Dokumen	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	1 dokumen	180.000.000,00	1 dokumen	198.000.000	1 dokumen	217.800.000	3 dokumen	595.800.000	Bidang Pengelolaan BMD	Kab. Lumajang
03.2.01.02	Tersedianya Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	0	1 dokumen	55.000.000,00	-	-	-	-	1 dokumen	55.000.000	Bidang Pengelolaan BMD	Kab. Lumajang
03.2.01.03	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	1 dokumen	72.955.000,00	1 dokumen	80.250.500	1 dokumen	88.275.550	3 dokumen	241.481.050	Bidang Pengelolaan BMD	Kab. Lumajang

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
03.2.01.04	Tersedianya Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	5 Dokumen	2 dokumen	30.001.000,00	2 dokumen	33.001.100	2 dokumen	36.301.210	6 dokumen	99.303.310	Bidang Pengelolaan BMD	Kab. Lumajang
03.2.01.05	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 dokumen	19.944.050,00	1 dokumen	21.938.455	1 dokumen	24.132.301	3 dokumen	66.014.806	Bidang Pengelolaan BMD	Kab. Lumajang
03.2.01.06	Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	0	1 laporan	30.022.000,00	1 laporan	33.024.200	1 laporan	36.326.620	3 laporan	99.372.820	Bidang Pengelolaan BMD	Kab. Lumajang
03.2.01.07	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan (998 sertifikat)	1 laporan	400.176.000,00	1 laporan	440.193.600	1 laporan	484.212.960	3 laporan	1.324.582.560	Bidang Pengelolaan BMD	Kab. Lumajang
03.2.01.08	Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 laporan	15.360.000,00	1 laporan	16.896.000	1 laporan	18.585.600	3 laporan	50.841.600	Bidang Pengelolaan BMD	Kab. Lumajang
03.2.01.09	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	8 Laporan	10 laporan	23.000.000,00	12 laporan	25.300.000	14 laporan	27.830.000	36 laporan	76.130.000	Bidang Pengelolaan BMD	Kab. Lumajang

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
03.2.01.10	Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	32 Dokumen	27 dokumen	200.000.000,00	29 dokumen	220.000.000	31 dokumen	242.000.000	287 dokumen	662.000.000	Bidang Pengelolaan BMD	Kab. Lumajang
03.2.01.11	Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	3 Laporan	7 laporan	45.488.584,00	7 laporan	50.037.442	7 laporan	55.041.187	21 laporan	150.567.213	Bidang Pengelolaan BMD	Kab. Lumajang
03.2.01.12	Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Laporan	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan	1 laporan	24.405.500,00	1 laporan	26.846.050	1 laporan	29.530.655	3 laporan	80.782.205	Bidang Pengelolaan BMD	Kab. Lumajang
03.2.01.13	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	325 orang	65 Orang	50.002.500,00	65 Orang	115.502.750	65 Orang	127.053.025	65 Orang	292.558.275	Bidang Pengelolaan BMD	Kab. Lumajang

**BAB VII**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

**7.1 Penentuan Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2024-2026**

Penetapan indikator kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang adalah untuk mengukur keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis yang mengacu pada RPD tahun 2024-2026 dengan indikator kinerja utama adalah Persentase ketepatan waktu penyampaian Dokumen Keuangan Daerah (Raperda APBD, Raperda P-APBD, LKPD, Pertanggungjawaban APBD)

Tujuan Renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang adalah terwujudnya reformasi birokrasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan indikator tujuan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun sasaran Renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang adalah mempertahankan ketertiban administrasi pengelolaan keuangan daerah dan Indikator Sasaran sebagai berikut :

Tabel VII.1  
Target Tujuan dan Sasaran Renstra PD tahun 2024-2026

TUJUAN	SASARAN	Indikator	Kondisi Kinerja pada Periode Awal RPD	Target Capaian Pada Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPD
				2024	2025	2026	
Optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Perlu Perbaikan	Perlu Perbaikan	Perlu Perbaikan	Perlu Perbaikan	Perlu Perbaikan
	Mempertahankan keteriban administrasi pengelolaan keuangan daerah	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Dokumen Keuangan Daerah (Raperda APBD, Raperda P-APBD, LKPD, Pertanggungjawaban APBD)	100%	100%	100%	100%	100%

**7.2 Penentuan Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah**

Indikator Kinerja Kunci (IKK) beserta target Badan Pengelola Keuangan Daerah ada sebagaimana tersaji pada tabel VII.2 (T-C.28) Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD di halaman berikut:



Tabel VII.2 TARGET KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN  
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH TAHUN 2024-2026

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi Penghitungan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Predikat	Nilai (kategori) Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun sebelumnya (N-2). Catatan : sumber data dari Keputusan Gubernur tentang hasil pengukuran IPKD Definisi operasional dikategorikan perlu perbaikan jika nilai IPKD berada diantara nilai MEAN-(1 x standar deviasi) dan MEAN+(1 x standar deviasi)	Perlu Perbaikan	Perlu Perbaikan	Perlu Perbaikan	Perlu Perbaikan	Perlu Perbaikan
2	Mempertahankan ketertiban administrasi pengelolaan keuangan daerah	Persentase ketepatan waktu penyampaian Dokumen Keuangan Daerah (Raperda APBD, Raperda P-APBD, LKPD, Pertanggungjawaban APBD)	Persen	Jumlah dokumen keuangan daerah yang disampaikan tepat waktu sesuai ketentuan dibagi jumlah dokumen keuangan daerah yang disampaikan kali seratus persen Catatan : yang dimaksud jumlah dokumen keuangan daerah adalah Raperda APBD, Raperda P-APBD, LKPD, Pertanggungjawaban APBD	100%	100%	100%	100%	100%
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Indeks dimensi penyerapan Anggaran dalam APBD	Angka	Skor rata rata dari penjumlahan jenis belanja dibagi total jenis belanja dikali bobot  Catatan : berdasarkan permendagri 19 tahun 2020	15	15	13	13	15

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi Penghitungan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
						2024	2025	2026	
		Indeks Dimensi Opini BPK atas LKPD	Angka	skor dibagi 3 dikali bobot	15	15	15	15	15
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase nilai aset tetap yang tidak bermasalah	Persen	Catatan : berdasarkan permendagri 19 tahun 2020 Skor opini BPK 3 tahun terakhir secara berturut turut Nilai aset tetap dikurangi nilai aset tetap bermasalah dibagi nilai aset tetap dikali 100%	90%	90%	90%	90%	90%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Persen	Jumlah fasilitas kebutuhan operasional kantor yang dipenuhi dibagi Jumlah fasilitas kebutuhan operasional kantor yang direncanakan dikali 100	100%	100%	100%	100%	100%

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah untuk 3 (tiga) tahun yang disusun sebagai tindaklanjut atas RPD Kabupaten Lumajang Tahun 2024–2026, yang secara umum memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, rencana program, kegiatan dan tolok ukur kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang yang akan dicapai, untuk digunakan sebagai pedoman serta arah dan kebijakan dalam mewujudkan tujuan dalam RPD terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan inovatif dengan sasaran terwujudnya reformasi birokrasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2024-2026, menjadi pedoman dalam :

1. Menyusun Rencana Kerja (Renja) dan program kegiatan prioritas setiap tahun;
2. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja
3. Perubahan dan Anggaran (RKPA) ;
4. Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen
5. Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA).
6. Menyusun SAKIP sebagai evaluasi atas capaian kinerja selama satu tahun.

Renstra ini merupakan dokumen perencanaan yang perlu dilakukan evaluasi pelaksanaannya setiap tahun, sehingga Renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah tidak bersifat kaku, tetapi fleksibel, responsif dan adaptif terhadap perubahan dan perkembangan jaman sejalan dengan perubahan-perubahan kebijakan pemerintah, perubahan regulasi maupun perubahan-perubahan perekonomian dalam skala global, nasional maupun regional.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah perlu adanya komitmen yang tinggi dari seluruh *stakeholder* di lingkungan Badan Pengelola Keuangan Daerah untuk dapat melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan secara konsisten.

Lumajang, 02 Mei 2023

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH



**SUNYOTO, SE, MM, MSA, Ak. CA**  
NIP. 19660709 199703 1001